



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR KEP-256/PW33/1/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020-2024

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tentang Indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1524/SU/01/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan acuan yang digunakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara atau sumber lainya sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate

Pada 1 September 2020

KEPALA PERWAKILAN,



ARYANTO WIBOWO

Form Pengisian "Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan"

1. Nama Unit Organisasi : Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
 2. Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II)

No.	Ref.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan
1	1 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Formulasi: Jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan. Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data : LHP dan/atau bukti setor
2	1 2		Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Formulasi: Jumlah nilai selisih dari potensi penerimaan negara/daerah dari hasil kegiatan pengawasan BPKP dengan target yang dianggarkan oleh K/L/D Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data : LHP
3	1 3		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Formulasi: Nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: LHP
4	1 4		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Formulasi: Nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: LHP
5	1 5		Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Formulasi: Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan dana transfer dalam rupiah Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: LHP
6	1 6		Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Formulasi: Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan pembiayaan daerah dalam rupiah Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: LHP
7	2 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Formulasi: Jumlah PP yang tercapai target dari total jumlah PP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: RPKP RPJM
8	2 2		Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Formulasi: Jumlah KP yang diawasi dengan kegiatan pengawasan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: RPKP RPJM
9	2 3		Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Formulasi: Jumlah KP yang tercapai target dari total jumlah PP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: RPKP RPJM
10	2 4		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Formulasi: Jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian PUPR
11	2 5		Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Formulasi: Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dilakukan pengawasan yang tercapai sesuai target Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: K/L
12	2 6		Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Formulasi: Analisis perbandingan antara Jumlah desa yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh desa yang diaudit kinerja Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: RKP 2021
13	2 7		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Formulasi: Jml LEHKP yang kesepakatannya terlaksana dibanding Total penugasan EHKP yang diterbitkan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Sistem informasi deputi bidang investigasi
14	3 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	Formulasi: Jumlah BUMN dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMN pada sektor yang bersangkutan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan hasil assessment GCG yang dilakukan BPKP ataupun assessor lain
15	3 2		Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Formulasi: Jumlah BUMD dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMD pada sektor yang bersangkutan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan hasil assessment GCG yang dilakukan BPKP ataupun assessor lain

No.	Ref.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan
16	3 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	Formulasi: Jumlah BUMD dengan kinerja minimal "Sehat" dibagi jumlah total BUMD Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Lapkin
17	3 4		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	Formulasi: Jumlah BLUD dengan kinerja minimal "Sehat" dibagi jumlah total BLUD Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Lapkin
18	3 5		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	Formulasi: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan Monitoring
19	4 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Formulasi: Jml KLPBU/ APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibanding Jml penugasan pengawasan represif Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Database hasil pengawasan bidang investigasi
20	4 2		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Formulasi: Jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi dibanding Jumlah KLPBU sasaran pengawasan preventif/edukatif Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
21	4 3		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Formulasi: Skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (implementedness) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian. Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Sistem informasi Deputi Bidang Investigasi
22	4 4		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Formulasi: Skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (implementedness) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Sistem informasi Deputi Bidang Investigasi
23	5 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Formulasi: APIP K/L/D dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3; dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L/D Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan Hasil QA; Laporan Pemantauan
24	5 2		Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Formulasi: Jumlah K/L/D dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan Hasil QA; Laporan Pemantauan
25	5 3		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Formulasi: Membina dan memantau penerapan pengelolaan risiko pada Pemda Provinsi yang telah memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Hasil Penilaian MRI
26	5 4		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Formulasi: Jumlah Pemda Kab/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Hasil Penilaian MRI
27	5 5		Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Formulasi: (Jumlah pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan dengan jumlah pemda di Indonesia) x 100%. Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan Hasil Audit BPK atas LKPD Tahun 2018 dan Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB Tahun 2019 atas SAKIP 2018
28	5 6		Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Formulasi: Banyaknya produk rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan oleh Deputi PPKD kepada para stakeholder terkait Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Dokumen Policy Brief
29	5 7		Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Formulasi: Analisis perbandingan antara jumlah desa yang telah Menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan
30	5 8		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Formulasi: Menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan
31	5 9		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	Formulasi: Sosialisasi dan asistensi Pengawasan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siswaskeudes Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan

No.	Ref.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan
32	5 10	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Formulasi: Jumlah BUMN yang berada pada maturitas MRI \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan hasil assessment MR
33	5 11		Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	Formulasi: Jumlah BUMD yang berada pada maturitas MRI \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Hasil MRI
34	5 12		Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	Formulasi: Jumlah BLUD yang berada pada maturitas MRI \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan hasil assessment MR
35	5 13		Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	Formulasi: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan hasil asesmen kapabilitas SPI
36	5 14		Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	Formulasi: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3 Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan hasil asesmen kapabilitas SPI
37	6 1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja E43:E51	Formulasi: skor Zona Integritas Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: KKA ZI
38	6 2		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Formulasi: Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi (Diklat, PPM, Workshop, dll) dibagi Jumlah Pegawai dikali 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Dokumen strategi dan program pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai
39	6 3		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Formulasi: Administrasi SDM (Kepangkatan, Database kepegawaian, KGB, dll) yang selesai tepat waktu dibagi Total Administrasi SDM dikali 100% Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Data Kepegawaian
40	6 4		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Formulasi: Jum RKA tepat waktu dibanding RKA setahun Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Data RKA
41	6 5		Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Formulasi: hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: OM SPAN
42	6 6		Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Formulasi: Jumlah SPM terbit 5 HK setelah berkas lengkap tanpa pengembalian dari KPPN dibagi total SPM dikali 100% Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Pengajuan SPM ke KPPN
43	6 7		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Formulasi: Laporan sesuai SAP dibanding total Laporan Tipe Penghitungan: Tidak Kumulatif Sumber Data: LK BPKP
44	6 8		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Formulasi: Pengelolaan BMN Baik sesuai ketentuan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan Monitoring/penilaian BMN
45	6 9		Nilai SAKIP Unit Kerja	Formulasi: Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: SA dan QA Inspektorat
46	6 10		Nilai Reputasi Unit Kerja (khusus unit Perwakilan)	Formulasi: Rata-rata dari hasil penilaian tiap variabel dalam Survei Reputasi BPKP Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei reputasi BPKP
47	6 11		Maturitas SPIP Unit Kerja	Formulasi: Sesuai Pedoman Maturitas SPIP di lingkungan BPKP Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: SA dan QA Inspektorat
48	6 12		Indeks MR Unit Kerja	Formulasi: Indeks MR diukur sesuai Pedoman Manajemen Risiko di Internal BPKP Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: SA dan QA Inspektorat
49	6 13		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Formulasi: Diukur menggunakan survei kepuasan layanan ketatausahaan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Survery Internal
50	6 14		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Formulasi: Diukur menggunakan survei layanan perwakilan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Survey internal dan Eksternal